

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA
DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)**



**IRWAN WIJAYA
1410321091**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Akuntansi

IRWAN WIJAYA

1410321091

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA
DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**
(Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)

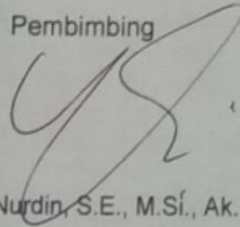
disusun dan diajukan oleh

IRWAN WIJAYA
1410321091

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 2 Juli 2018

Pembimbing



Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA
DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)

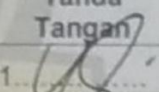
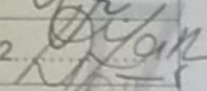
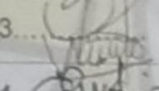
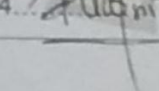
disusun dan diajukan oleh

IRWAN WIJAYA
1410321091

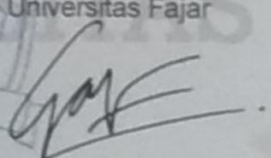
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 6 Juli 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurbayani, S.E., M.Si	Anggota	3. 
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA	Eksternal	4. 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irwan Wijaya

NIM : 1410320191

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,


Irwan Wijaya



PRAKATA

Segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan Proposal Penelitian dan tidak lupa pula mengirimkan salam, shalawat, dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti pada saat ini dan membimbing kita semua menuju jalan yang benar tidak lupa pula mengirimkan salam kepada Keluarganya, sahabat sahabatnya, dan para pengikut beliau.

Proposal Penelitian ini disusun dalam keadaan sadar dan terlebih dahulu membaca buku pedoman penulisan laporan. untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Kedua Orang Tua saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta kepada Ibu Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan dan masukannya, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Kepada Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Kepada Bapak Muhammad Gaffur, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1.
4. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Simpul Sulawesi Selatan yang telah memberikan semangat.
5. Teman-teman yang terhimpun dalam Double Enam yang telah banyak membantu dalam hal memfasilitasi kendaraan.

6. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar yang telah menyemangati penulis dalam menyusun laporan.
7. Kepada Rahmayani yang telah membantu memfasilitasi buku-buku yang di perlukan.
8. Kepada Chandika Usman Malik dan Muhammad Hassan yang selalu mendukung penuh dalam penyusunan Proposal Penelitian.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi penyempurnaan laporan ini, karena penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik sang pencipta dan kita Cuma berusaha untuk sempurna namun kekuranganlah yang membatasi.

Makassar, 29 Maret 2018

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)

**IRWAN WIJAYA
YASMI NURDIN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, mengingat bahwa tekad pemerintah membangun perekonomian dari pinggiran daerah yaitu dari desa sehingga kucuran dana dari pemerintah pusat sebagai bentuk implementasi dari lahirnya undang-undang tentang desa jumlahnya mencapai Rp. 20,7 Triliun. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban dana desa harus akuntabel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian *explanatory* (penelitian penjelasan), studi kasus pada kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi *SPSS 21 for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,7% Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Semakin baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa maka akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih serta semakin tingginya tingkat kesadaran kita atau tingkat komitmen kita terhadap organisasi atau instansi dalam hal komitmen organisasi pemerintah desa maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas dana desa, Kompetensi Akuntansi, Komitmen Organisasi

ABSTRACT

ACCOUNTING COMPETENCY INFLUENCE OF VILLAGE FUND MANAGEMENT OFFICER AND VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION COMMITMENT TO ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT

(Study at South Sinjai District Sinjai Regency)

**IRWAN WIJAYA
YASMI NURDIN**

The purpose of this research is to know the influence of village fund management officer accounting competency and village government organization commitment to accountability of village fund management, remember that government determination to develop economy from remote area that is from village so funding from central government as implementation of the law of village the number reached Rp. 20,7 Trillion. Therefore, accountability reports of village fund must be accountable.

This is quantitative research with explanatory research design (explanatory research), case study at South Sinjai District Sinjai Regency. Data were collected by questionnaires, documentation, and literature review. Data analysis is using SPSS 21 for windows application.

The finding of this research show that 57,7% accountability of village fund management is influenced by variable of village fund management officer accounting competency and village government organization commitment, the rest is influenced by other variables. The better village fund management officer accounting competency, the better the accountability of village fund management as evidence by net accountability reports and the higher level of our awareness or the level of our commitment to the organization or institution in terms of commitment of the village government organization, the better accountability of village fund management.

Keyword : Accountability of village fund, Accounting Competency, Organization Commitment

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Desa	8
2.2 Tinjauan Empirik	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Definisi Operasional.....	25
2.5 Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	30
--------------------------------	----

3.2 Tempat dan Waktu	30
3.3 Populasi dan Sampel.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Pengukuran Variabel	33
3.7 Instrumen Penelitian	34
3.8 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Statitik Deskriptif	41
4.2 Hasil Uji Kualitas Data	42
4.3 Uji Asumsi Klasik	44
4.4 Hasil Uji Hipotesis.....	50
4.5 Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	25
4.1 Hasil Uji Normalitas – Grafis Histogram	46
4.2 Hasil Uji Normalitas – Probability Plot	47
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	21
3.1 Penilaian Skor Pernyataan	35
4.1 Hasil Uji Validitas	41
4.2 Hasil Uji Reabilitas	43
4.3 Hasil Uji Normalitas	44
4.4 Hasil Uji Multikoloniritas	45
4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	48
4.6 Hasil Uji T – Uji Parsial	50
4.7 Hasil Uji F – Uji Simultan	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak terpilihnya Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden Republik Indonesia, yang mengusung program pembangunan yang dinamakan Program Nawacita, dimana salah satu isinya tentang “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber perekonomian negara dimulai dari desa, sehingga perekonomian desa serta pemerataan pembangunan daerah yang menunjang ekonomi menjadi fokus perhatian untuk mengembangkan ekonomi dan membangun bangsa ini melalui pinggiran dan memperkuat daerah-daerah serta desa itu sendiri.

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Maraknya media yang memberitakan tentang banyaknya kepala desa yang terjerat kasus korupsi salah satunya yang diberitakan oleh detik.com Kamis 24 Agustus 2017. 15:22 WIB, maka dipandang perlu adanya aturan ataupun mekanisme yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi secara *continue*. Anggaran dana desa sebesar Rp. 20,7 Triliun yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk implikasi dari lahirnya UU tentang Desa yang dinilai rawan korupsi dan menyeret para kepala desa ke penjara. Melihat berbagai macam variasi dan karakteristik desa, aparatur desa seharusnya memiliki kompetensi untuk menghadapi regulasi yang relatif baru, sehingga dapat mencegah potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa. Seperti halnya pengetahuan Akuntansi dalam tahapan monitoring dan evaluasi tahapan pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini juga diakibatkan karena adanya satuan struktur perangkat desa yang tidak berjalan sesuai dengan fungsionarisnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disingkat BPD.

BPD seharusnya independen dengan kepala desa dan harus terlibat langsung dalam penyusunan anggaran beserta masyarakat, serta laporan dan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh aparat desa. Laporan Pertanggungjawaban itu seharusnya disampaikan ke BPD dan mendapat persetujuan dari BPD sebelum dilaporkan kepada inspektorat, bisa dibilang bahwa BPD adalah auditor internal skala desa, akan tetapi kebanyakan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwasanya BPD tidak mengerti hak dan kewajibannya serta wewenangnya dalam struktur desa. Sehingga, Laporan dan pertanggungjawaban ditolak oleh inspektorat yang berdampak tidak terlaksananya proses pencairan dana.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana dalam hal ini ketika sebuah

perencanaan dan penatausahaan tidak dibarengi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik maka tingkat keabsahannya sangat rendah, mungkin dengan adanya pembuktian yang memadai seperti pada saat penyusunan laporan dapat dibarengi dengan bukti seperti nota-nota dan dokumentasi tahapan pengerjaan suatu infrastruktur, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dimana di dalamnya sudah mencakup tentang prosedur pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. selain itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, Peraturan ini adalah acuan untuk setiap desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan telah menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dijadikan referensi oleh aparat pengelola dana desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sarifuddin Mada dkk (2017), beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Menurut Sujarweni (2015:17) akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Kemudian dibuktikan dengan dengan nota-

nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Menurut Warsono dkk (2013:1) Fungsi dasar akuntansi adalah menyediakan informasi dana suatu entitas atau unit organisasi. Di era sekarang uang merupakan salah satu alat pertukaran dalam banyak aktivitas. Oleh karena itu, adalah wajar jika pengelolaan dana merupakan hal yang krusial. Untuk itu akuntansi sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi tentang kondisi maupun perkembangan dana.

Berdasarkan literasi di atas jelas bahwa sudah seharusnya proses atau kegiatan operasional desa serta semua hak dan kewajiban desa yang sudah bernilai dengan uang harus dikelola dengan dengan baik. Kemudian harus dilakukan pengawalan ataupun pengawasan ke depan oleh disiplin ilmu Akuntansi.

Komitmen organisasi merupakan suatu sikap ataupun kesiapan setiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi/instansi pemerintahan dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi, dimana individu tersebut tetap ingin berada. Dengan kata lain bahwa bisa bertahan di organisasi/instansi pemerintahan demi mencapai tujuan dan kelangsungan organisasi.

Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. Tahun 2015, pemerintah sudah mengkolontarkan Rp.20,76 triliun untuk dana desa. Sementara, 2016 meningkat menjadi Rp.45,98 triliun. Adapun tahun 2017 sebanyak Rp.60 triliun.

Melihat kucuran dana yang sangat besar dan sulit diantisipasi oleh aparat desa. Sehingga, Secara umum beberapa permasalahan dapat terjadi antara lain

:keterlambatan penyampaian laporan, tidak sesuai laporan pertanggungjawaban dengan Undang-undang yang berlaku, belum tertibnya administrasi keuangan, semakin banyaknya pemberitaan tentang temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran dan belum optimal penyerapan anggaran. Dengan demikian, permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan akuntansi aparat desa dalam mengelola dana desa serta masih lemahnya komitmen organisasi pemerintah desa dalam mencapai tujuannya.

Demikian pula halnya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dana desa yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan. Menurut Jusman Ahmad yang merupakan salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Sinjai yang dikonfirmasi melalui pesan singkat via *whatsApp* menerangkan bahwa beberapa desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan laporan pertanggungjawaban dana desanya ditolak berkali-kali dikarenakan oleh adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan implementasi yang ada. Hal ini dikarenakan aparat desa yang mengelola dana desa belum memiliki kompetensi lebih terhadap hal tersebut. Selain itu juga telah diberitakan oleh salah satu media *online* yakni WWW.ONLINE24JAM.COM pada hari Rabu (24/5/2017) bahwa masyarakat Desa Bulukamase mendatangi kantor DPRD Sinjai untuk menyampaikan aspirasinya terkait proses perekrutan aparat desa yang dianggap curang dan menyalahi aturan.

Berdasarkan uraian di atas dan kondisi yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kompetensi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan**

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimana Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat secara simultan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman serta memecahkan rasa penasaran mengenai pengaruh kompetensi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

2. Kegunaan bagi mahasiswa lain yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas-tugas serta dalam menyusun skripsi yang sejenis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan penelitian bagi desa yang berada di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai yaitu mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi staf desa terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa.
3. Sebagai referensi bagi staf desa untuk mengembangkan perangkat-perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Desa

2.1.1 Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.1.2 Karakteristik *Good Governance* Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP)

Menurut Renyowijoyo (2013:12) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah sebagai berikut:

- a. *Rule of Law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

- b. *Transparancy*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.
- c. *Responsiveness*. Lembaga-Lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *Stackholder*
- d. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- e. *Equity* Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.
- f. *Efficiency and Efectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*).
- g. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

2.1.3 Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa merupakan sumber pengelolaan dan pembangunan desa dimana keuangan desa disajikan secara akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Untuk mencapai pembangunan desa yang produktif maka keuangan desa harus dikelola dengan baik pula. Keuangan desa memang merupakan pengelolaan keuangan yang ruang lingkupnya kecil berbeda dengan keuangan Kabupaten, Provinsi, Pusat apalagi keuangan perusahaan. Namun tidak sembarang orang yang berhak mengelola keuangan apapun selain orang yang betul-betul mengerti tentang pengelolaan keuangan ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu akuntansi (*financial accounting*) pada khususnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Peran kepala desa dan perangkat desa lainnya.

2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut BPKP (2015:35) Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.5 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.1.6 Pengertian Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson dalam Indrajaya (2017), dari berbagai sumber, antara lain bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja. Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan. Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan. Definisi lain menurut Kumorotomo dalam Indrajaya (2017), menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai

negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil juga mendefinisikan mengenai unsur-unsur kompetensi teknis antara lain:

- a. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
- b. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual.
 - 2) Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
 - 3) Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda.
 - 4) Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
 - 5) Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Sopiah dalam Suryana (2013) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi adalah komitmen pada organisasi secara global. Komitmen ini menggambarkan perasaan untuk tetap bersama organisasi yang diwarnai dengan kesetujuannya dengan tujuan, dan nilai yang dimiliki organisasi. Selanjutnya, menurut Sardjito dan Muthaher dalam Suryana (2013) komitmen organisasi adalah komitmen yang menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya. Komitmen menunjukkan hasrat karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi organisasi.

Berkaitan dengan komitmen organisasi Trisnaningsih dalam Suryana (2013) mengatakan komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen karyawan terhadap organisasinya adalah kesetiaan karyawan terhadap organisasinya, disamping juga akan menumbuhkan loyalitas serta mendorong keterlibatan diri karyawan

dalam mengambil berbagai keputusan. Oleh karenanya komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi karyawan terhadap organisasinya.

Menurut Setiawan dan Ghozalli dalam Suryana (2013), konsep komitmen organisasional didasarkan pada premis bahwa individual membentuk suatu keterikatan (*attachment*) terhadap organisasi. Secara historis komitmen organisasional merupakan perspektif yang bersifat keperililakuan dimana komitmen diartikan sebagai perilaku konsisten dengan aktivitas (*consistent lines of activity*).

Berdasarkan definisi diatas, maka komitmen organisasi merupakan tingkat intensitas seseorang untuk mengidentifikasi dirinya serta tingkat keterlibatannya dalam organisasi terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anggota organisasi.

2.1.8 Konsep Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Romantis (2015), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Romantis (2015), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat

pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Romantis (2015), menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah.

Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;

- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Pandey dkk (2015)	Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)	1. Secara parsial, faktor-faktor hanya faktor pengalaman kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa, sementara kedua faktor lainnya (pendidikan formal dan pelatihan/keterampilan) berpengaruh tidak nyata terhadap kinerja aparat

			<p>pemerintah desa. Dengan demikian, dari ketiga faktor tersebut, faktor pengalaman kerja tampaknya lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa dibanding kedua faktor lainnya.</p> <p>2. Sementara itu, secara simultan atau bersamaan, ketiga faktor tersebut (pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja) berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa.</p>
2.	Sarifudin Mada dkk. (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolah Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	<p>1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p> <p>2) Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin tinggi komitmen</p>

			<p>pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p> <p>3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p>
3.	Sutrawati (2016)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan dana desa (studi pada desa pudaria jaya kecamatan moramo)	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa hasil pengujian dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 19 responden dengan nilai persentase sebesar 80,11% dapat dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4.	Subroto (2009)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

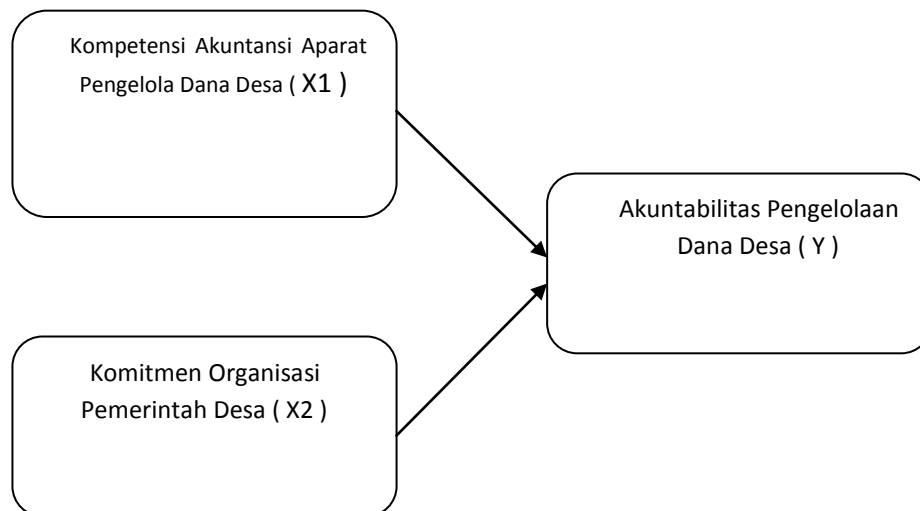
		<p>Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)</p>	<p>1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).</p> <p>2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.</p> <p>3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis</p>
--	--	---	---

			<p>maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini membahas tentang kompetensi (pengetahuan) aparat pengelola dana desa serta komitmen organisasi pemerintah desa yang dihubungkan dengan akuntabilitas dana desa.

1. Kompetensi (Pengetahuan) Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa, dimaksudkan untuk memberikan informasi dan perbandingan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh orang yang disiplin ilmunya akuntansi.
2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dalam hal ini pemerintah desa sangat diperlukan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan utama.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, tercapainya semua tujuan dan laporan dapat dipertanggungjawabkan, laporan pertanggungjawaban dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi semua indikator dari Akuntabilitas itu sendiri.

Adapun yang ingin dicapai adalah melihat bagaimana pengaruh variabel *Independen* terhadap variabel *Dependen*. Kompetensi (pengetahuan) sangatlah dibutuhkan dalam segala hal pekerjaan ataupun tuntutan untuk berbuat sesuatu, secara spesifik bahwa Kompetensi (pengetahuan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan akuntansi aparat desa yang menangani masalah keuangan desa dan Alokasi dana desa, sebab anggaran desa yang dikelola pada saat ini nominalnya mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu sangat diharapkan *skill* yang memadai dalam hal ini dalam skala desa minimal paham dasar akuntansi atau dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang benar dan taat terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, tentu diperlukan komitmen dalam menjalankannya, komitmen organisasi juga merupakan salah satu penunjang yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaporan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian serta pembangunan yang merata dalam skala desa, oleh karenanya sudah seharusnya pemerintah desa menaati indikator-

indikator akuntabilitas seperti: kejujuran dan keterbukaan informasi, Kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan.

2.5 Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian Pandey dkk (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi kepala desa masih belum maksimal sebagai pendorong dan penggerak, serta pembantu program pemerintah dalam rangka peningkatan keberhasilan Pembangunan Desa. Tingkat keberhasilan pembangunan desa masih tergolong rendah. Kompetensi aparatur desa yang baik sudah pasti akan mendukung pengelolaan keuangan dana desa, begitu juga sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa rendah sudah pasti akan menyebabkan pengelolaan keuangan dana desa menjadi terhambat karena masih terdapat kesalahan dalam proses penyusunannya.

Menurut Sarifuddin Mada dkk (2017) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dengan hipotesis sebagai berikut:

H1. Kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Suryana (2013) Komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat.

Menurut Sarifuddin Mada dkk (2017) Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan sangat ditentukan oleh profesionalisme terhadap bidang yang ditekuninya. Profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan komitmen serta independensi untuk mencapai tingkatan yang tertinggi. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal, seperti: karir, keluarga, lingkungan pergaulan sosial dan sebagainya. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik atau malah sebaliknya menyebabkan seseorang justru meninggalkan pekerjaannya, akibat suatu tuntutan

komitmen lainnya. Komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja suatu pekerjaan. Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis :

H2. komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *explanatory* (penelitian penjelasan). Menurut Jogiyanto (2014:12) Menurut Cooper & Schindler Reset *explanatory* adalah riset yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada, dengan karakteristik riset yaitu riset kausal. Menurut Sugiyono (2015:59) Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory* karena peneliti ingin menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antara variabel independen (pengetahuan akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa).

Dalam pelaksanaannya penelitian *explanatory* menggunakan metode penelitian survei, dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Menurut Jogiyanto (2014:115) penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Kecamatan Sinjai Selatan merupakan pintu gerbang Kabupaten Sinjai di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah 131,99

km² , 27 km² dari ibukota kabupaten, dan 195 km² jarak dari Makassar yang dapat ditempuh kendaraan bermotor sekitar \pm 4 jam.

Adapun waktu penelitian adalah bulan Mei sampai dengan Juni 2018 dengan kata lain penelitian dilakukan selama 2 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2014:119) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pengelola dana desa sebanyak 10 desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang terdiri atas: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Keuangan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

2. Sampel

Sugiyono (2014:120) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yakni metode yang berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah:

1. Desa yang dianggap kurang dalam ketepatan penyampaian laporan.
2. Desa yang letaknya terdekat dan terjauh dari Ibu Kota Kecamatan
3. Desa yang menjadi Ibu Kota Kecamatan

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka hanya 6 desa yang memenuhi kriteria sampel tersebut dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Adapun desa yang menjadi sampel

dalam penelitian ini yaitu: Desa Bulukamase, Desa Palae, Desa Talle, Desa Aska, Desa Gareccing, dan Desa Polewali (Kepala Desa, Sekertaris desa, Bendahara desa dan Kaur Keuangan desa serta Badan Permusyawaratan Desa).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik diri seorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal. Data Primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner.

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ini diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen organisasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, dimana sudah disediakan alternatif jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahuinya, untuk memperoleh data yang sebenarnya, kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden di setiap desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen maupun dalam bentuk gambar.

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, berdasarkan kajian literature atau teori yang ada.

3.6 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan indikator dari masing-masing variable yang diambil dalam penelitian terdahulu. Variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa yaitu, Pengetahuan (*Knowledge*), Kemampuan (*Skill*) dan Sikap (*Attitude*). Indikator Variabel komitmen organisasi pemerintah desa yaitu, Afektif, Keberlanjutan, dan Normatif. Sedangkan indikator dalam variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu, Kejujuran dan Hukum, Serta Proses, Sarifuddin Mada dkk (2017).

Semua indikator dalam variabel diukur menggunakan skala *likert* 5 poin. Menurut Sugiyono (2014:136) Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social dalam penelitian, Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Adapun Kuesioner untuk mengukur variabel Pengetahuan Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa (X_1), Komitmen Organisasi Aparat Desa (X_2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 skala *likert* dengan memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Penilaian Skor Pernyataan

Jenis Pernyataan	Jenis Jawaban	Skor
Positif	Sangat Setuju (SS)	5
	Setuju (S)	4
	Ragu/Netral (R)	3
	Tidak Setuju (TS)	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menganalisis variabel independen yaitu Pengetahuan Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode analisis data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi *computer program IBM SPSS 21 for windows*.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuisisioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut Ghozali (2013). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid.
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.. Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* >0.60 atau lebih besar daripada 0.60.

2. Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal,

kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan:

- 1) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan
- 2) *Normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013).

Cara lain adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one- simple kolmogorov-smirnov* adalah:

- 1) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan $VIF > 10$, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut. (Ghozali, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Ghozali, 2013). Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel dependen (Gujaranti, 2003 dalam Ghozali, 2013). Jika tingkat signifikannya di

atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka dalam metode statistik, sebagai berikut:

a. Regresi Liner Berganda

Analisis regresi linier Berganda untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Adapun persamaan regresi linier sederhana dapat dinyatakan, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana :

Y = variabel terikat

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien arah regresi

X = Variabel bebas

e = Error

b. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghazali dalam Nurbaedah (2009:45) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*), Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel independen

memberikan hampir sama semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi.

c. Uji Statistik t

Menurut Santoso dalam Nurbaedah (2009:45) Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bersifat menentukan (*Significant*) atau tidak, dengan kriteria berdasarkan nilai signifikansi <0.05 maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya >0.05 , maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Regresi secara simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat:

a) Membandingkan t hitung dengan t tabel

(1) Jika t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

(2) Jika t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b) Melihat *Probabilities Values*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

(1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

(2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinjai Selatan dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 30 kuesioner untuk 30 responden dan kembali sebanyak 30 responden atau 100% kuesioner yang dibagikan kembali semua.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

No	Uraian	Frekuensi	Presentasi
1	Umur		
	18 - 22 Tahun	1	0,03%
	22 – 27 Tahun	7	0,23%
	27 - 32Tahun	2	0,06%
	>32 Tahun	20	0,67%
2	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	21	0,7%
	Perempuan	9	0,3%
3	Tingkat Pendidikan		
	SD	-	-
	SMP	-	-
	SMA	13	0,43%
	D3	1	0,03%
	S1	16	0,53%

Sumber : Data Diolah 2018

Berdasarkan table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden dalam pengelolaan keuangan dana desa. Karakteristik responden berdasarkan yaitu umur 18 – 22 tahun yakni (0,03%), umur 22 – 27 tahun yakni (0,23%), umur 27 – 32 tahun yakni (0,06%) dan umur >32 tahun yakni (0,67%),

dilihat dari karakteristik jenis kelamin didominasi oleh laki-laki yaitu (0,7%) sedangkan perempuan sebanyak (0,3%), sedangkan karakteristik responden dilihat dari pendidikannya yaitu responden yang berpendidikan terakhir SD dan SMP itu tidak ada dan yang berpendidikan SMA yakni (0,43%), D3 yakni (0,03%) serta S1 yakni sebanyak (0,53%).

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan Valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui *item* pernyataan itu valid yaitu dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila *item* pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel $(n) = 30$ responden dan besarnya df dapat dihitung $30 - 2 = 28$ dengan t tabel sebesar 0,361 Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kompetensi Akuntansi	X1.1	0,891	0,361	Valid
	X1.2	0,869	0,361	Valid
	X1.3	0,594	0,361	Valid
	X1.4	0,726	0,361	Valid
	X1.5	0,736	0,361	Valid
	X1.6	0,747	0,361	Valid
Komitmen Organisasi	X2.1	0,636	0,361	Valid
	X2.2	0,600	0,361	Valid
	X2.3	0,771	0,361	Valid
	X2.4	0,733	0,361	Valid
	X2.5	0,794	0,361	Valid
Akuntabilitas	Y1	0,860	0,361	Valid
	Y2	0,632	0,361	Valid
	Y3	0,816	0,361	Valid
	Y4	0,777	0,361	Valid
	Y5	0,757	0,361	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

Tabel 4.1 tersebut diatas memperlihatkan bahwa seluruh *item* pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada R-tabel. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	Kompetensi Akuntansi	0,853	Reliabel
2	Komitmen Akuntansi	0,689	Reliabel
3	Akuntabilitas	0,824	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cornbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kompetensi akuntansi, komitmen organisasi dan akuntabilitas yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistic yang dilakukan yaitu pengujian *one sample Kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $>0,05$. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas – one sample Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,62152363
	Absolute	,146
Most Extreme Differences	Positive	,107
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		,798
Asymp. Sig. (2-tailed)		,548

a. Test distribution is Normal.

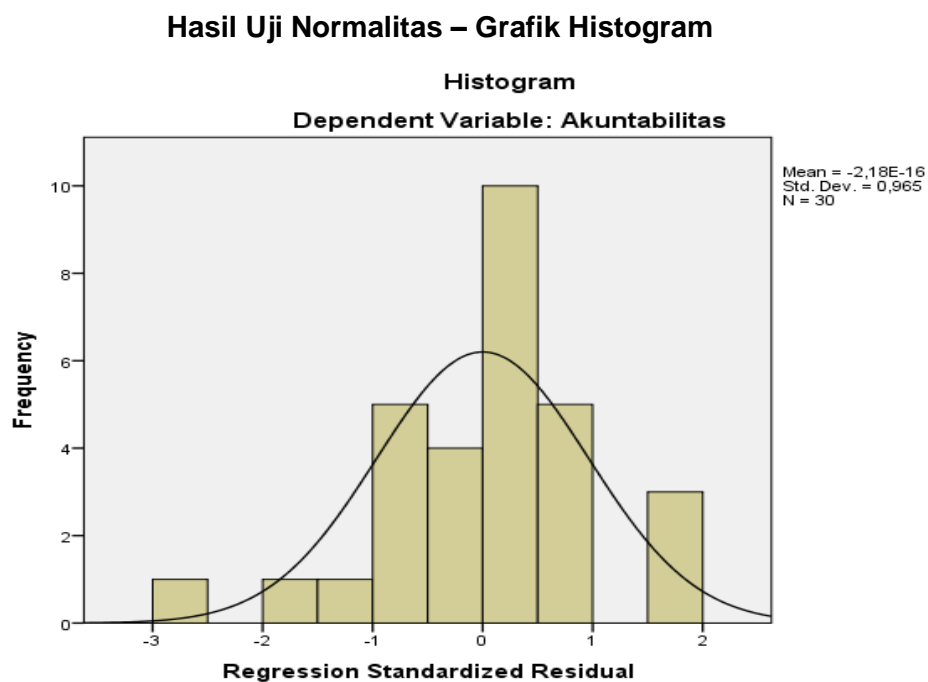
b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.3 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,548, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

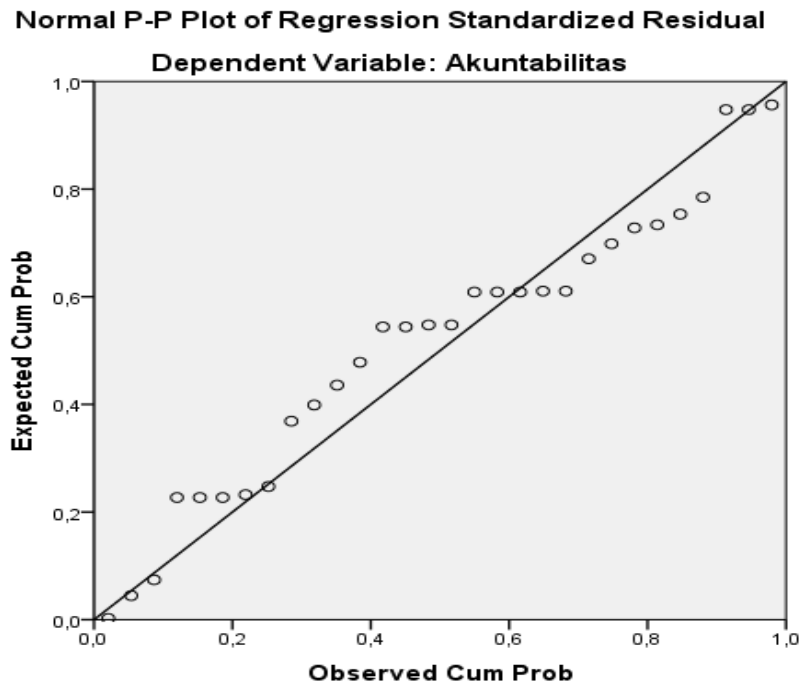
Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot.

Gambar 4.1



Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas - Normal Probability Plot



Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Gambar 4.2 menunjukkan adanya titik-titik (data) yang tersebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regersi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen.

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*, Sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance* $>0,10$ dan *VIF* <10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* $<0,10$ dan *VIF* >10 , maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Akuntansi	,678	1,474
Komitmen Organisasi	,678	1,474

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai *VIF* untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen.

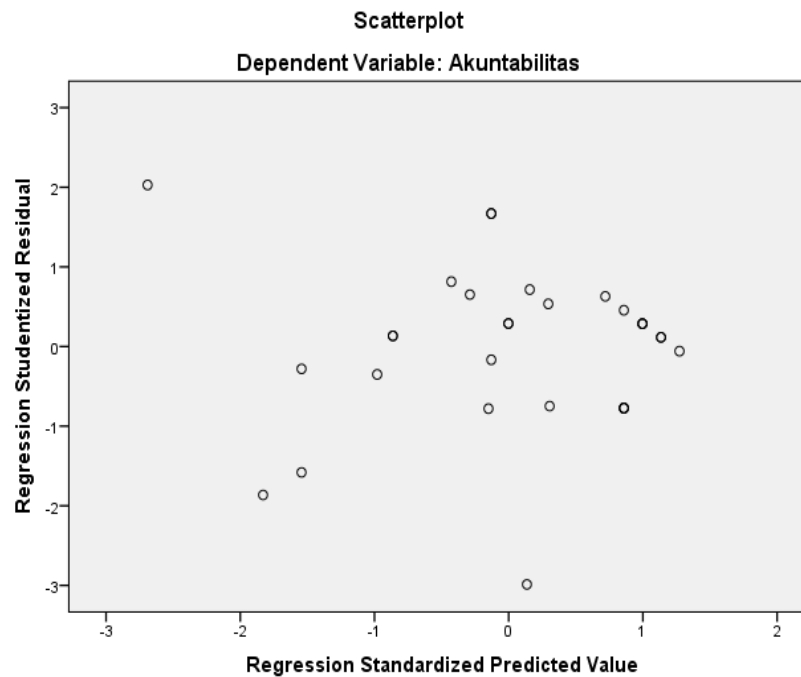
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model

regresi tersebut bebas dari masalah Heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 4.3

Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot



Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 dan H_2 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,778 ^a	,606	,577	1,68051

Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Akuntansi

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,577, hal ini berarti bahwa 57.7% yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa. Persentase sebesar 57,7% dipengaruhinya akuntabilitas pengelolaan dana desa ini sangatlah wajar dimana jumlah dari persentase tidak jauh diatas 50% dan tidak dibawa dari 50% sebab akuntabilitas pengelolaan dana desa bukan merupakan satu satunya asas pengelolaan dana desa, asas pengelolaan dana desa ada tiga yaitu

akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi. Akan tetapi pertimbangan pertama terhadap kinerja pemerintah yaitu tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa yang baik dan efektif terhadap kegiatan operasional maupun nonoperasional desa sehingga dapat dikatakan akuntabel serta menunjang asas yang lain. Selebihnya sebesar 42,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yaitu, transparansi dan partisipasi.

Tabel 4.7
Hasil Uji T – Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,847	3,486		,243	,810
Kompetensi Akuntansi		,152	,557	3,798	,001
Komitmen Organisasi	,278	,130	,313	2,131	,042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 0,847 + 0,577X_1 + 0,278 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas

X₁ = Kompetensi Akuntansi

X₂ = Komitmen Organisasi

a = Konstanta

e = Eror

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 0,847 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (kompetensi akuntansi dan komitmen organisasi) adalah nol maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terjadi sebesar 0,847.
- b. Koefisien regresi variabel kompetensi akuntansi (X1) sebesar 0,577 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,0577.
- c. Koefisien regresi variabel dari (X2) sebesar 0,278 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komitmen organisasi pemerintah desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,278.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 dan H_2), yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut :

3. Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H_1)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi akuntansi memiliki t hitung sebesar 3,798 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $30 - 3 = 27$ t tabel 2,0518 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima. Hal ini berarti kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis pertama yang mengatakan bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti. Demikian pula hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa semakin baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa maka akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih dan melaporkan yang sebenarnya serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

4. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel komitmen organisasi memiliki t hitung sebesar 2,131 > t tabel 2,0518 dengan tingkat signifikansi 0,042 yang demikian lebih kecil dari 0,05, maka H₂ diterima. Hal ini berarti komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian maka hipotesis kedua juga diterima dan terbukti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran kita atau tingkat komitmen kita terhadap organisasi atau instansi dalam hal komitmen organisasi pemerintah desa maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4.8
Hasil Uji F – Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	117,216	2	58,608	20,753	,000 ^b
Residual	76,251	27	2,824		
Total	193,467	29			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Akuntansi

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20,753 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka semua variable dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas p engelolaan dana desa (H_1)

Hopotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized variabel kompetensi akuntansi sebesar 0,577 dan (sig.) t sebesar 0,001. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Demikian pula hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa maka akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih dan melaporkan yang sebenarnya serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

Melihat dimensi Pengetahuan (*Knowledge*), Kemampuan (*Skill*) dan Sikap (*Attitude*) yang dimiliki aparat pengelola dana desa sangat mendukung beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dimulai dari pengetahuan hingga kemampuan kita untuk mengembangkan pengetahuan

tersebut serta keahlian teknis dan kemampuan mencari solusi yang kesemuanya didasari oleh inisiatif aparat desa dalam bekerja dan juga keramahan dan kesopanan yang menjadi penunjang dalam semua indikator. Maka dengan ini dikatakan bahwa ketiga dimensi dalam kompetensi akuntansi sangatlah penting karena melihat undang-undang atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran, dimana dalam pengelolaannya tidak terlepas dari peran kepala desa serta adanya pengawasan dan kontroling dari Badan Permusyawaratan Desa. Kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik lain, menurut Kumorotomo dalam Indrajaya (2017).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin Mada. dkk. (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh subroto (2009), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparat pemerintah desa merupakan faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidak sesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga laporan pertanggungjawaban tidak mencerminkan pengelolaan yang akuntabel.

Pada observasi awal memang terlihat ada perbedaan dengan hasil penelitian, hal ini terlihat pada objek penelitian terhadap kompetensi yang

melatar belakangi aparat pengelola dana desa belum sesuai dengan apa yang akan dikerjakan, sedangkan hasil penelitian harus sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi agar pengelolaan dana desa baik dan dapat dikatakan akuntabel. Hal ini terjadi karena responden menilai dirinya baik dan menggunakan logika pada saat penelitian menggunakan metode pengumpulan data terhadap responden dengan melakukan kuesioner. Aparat pengelola dana desa yang di Kecamatan Sinjai Selatan yang terdiri dari beberapa desa yang menjadi objek pada penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda beda sehingga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengetahuan akuntansi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sinjai Selatan belum sesuai dengan hasil penelitian ini dikarenakan kurangnya perhatian lebih dari pemerintah sehingga dianggap bahwa system pemerintah yang terjadi masih *primitive*.

- b. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta *unstandardized* variabel komitmen organisasi sebesar 0,278 dan (sig.) t sebesar 0,042. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti beberapa pertimbangan dalam sikap dan komitmen pemerintah desa atas keyakinan terhadap organisasi dan kesetiaan dalam organisasi menjadi faktor paling penting dan harus dimiliki oleh pemerintah desa

untuk menjaga afektif dan keberlanjutan organisasi atau instansi pemerintah desa.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin Mada. dkk. (2017), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian ini selaras dengan konsep akuntabilitas yang dikembangkan oleh Cavoukian *et al.* Cavoukian *et al* (2010:409) mengemukakan terdapat lima elemen penting dari akuntabilitas adalah: (1). Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan penerapan kebijakan internal yang konsisten dengan kriteria eksternal, (2). Mekanisme untuk menerapkan kebijakan privasi, termasuk alat, pelatihan, dan pendidikan, (3). Sistem untuk pemeriksaan pengawasan dan penjaminan internal dan eksternal, (4). Transparansi dan mekanisme untuk partisipasi individu, dan (5). Sarana untuk remediasi dan penegakan eksternal. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, komitmen orang-orang dalam organisasi menjadi penting.

Berdasarkan hasil pengujian H₂ yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini mengartikan bahwa pemerintah desa seharusnya menempatkan orang-orang yang mempunyai keyakinan terhadap tujuan organisasi yang memiliki kesetiaan dalam organisasi bukan untuk mendirikan perusahaan keluarga dalam artian kepala desa merekrut aparat pemerintah desa dari keluarganya atau yang mendukungnya saat menjadi calon kepala desa tanpa memikirkan kelangsungan hidup organisasi, berdasarkan pengamatan peneliti hal tersebut banyak terjadi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan, seperti halnya yang terjadi di desa bulukamase

bahwa perekrutan aparat desa dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan komitmen terhadap organisasi

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *explanatory* (penelitian penjelasan) dengan model penjelasan hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel independen (pengetahuan akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Berdasarkan keseluruhan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bawah hubungan kedua variabel sangat mempengaruhi dan dipengaruhi, hal ini dapat dilihat dalam hipotesis pertama (H1) dimana sebab kurangnya kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Sebaliknya, kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa terpenuhi maka laporan pertanggungjawaban akan baik yang menyebabkan pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel. Selanjutnya hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa sebab tingginya keyakinan terhadap tujuan organisasi, mempertahankan keanggotaan organisasi dan kesetiaan dalam organisasi akibatnya pengelolaan dana desa dapat cepat terselesaikan sesuai dengan waktu pelaporan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel.

Namun, temuan lapangan dalam penelitian ini kebanyakan aparat pengelola dana desa bukan dari pendidikan akuntansi ataupun ekonomi yang memiliki dasar ilmu penyusunan laporan keuangan. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kadang tidak diterima dan menghambat pencairan dana. Berdasarkan pengamatan peningkatan pelayanan lapangan sudah ada beberapa desa yang dalam

pengelolaannya tergolong cepat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti Desa Aska, Desa Gareccing dan Desa Polewali diaman dalam ketiga desa ini tergolong cepat dalam pencairan dana desanya, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Suyuti salah satu mantan sekertaris desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan dan pelaporan di desa tersebut sudah tergolong baik sisanya masih melambat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa maka akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih dan melaporkan yang sebenarnya serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat.
2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran kita atau tingkat komitmen kita terhadap organisasi atau instansi dalam hal komitmen organisasi pemerintah desa maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Keseluruhan variabel yang ada, memiliki tingkat pengaruh yang sangat signifikan akan tetapi sangat bertolak belakang dari keadaan yang sebenarnya pada objek penelitian di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan (Desa Bulukamase, Desa Palae, Desa Talle,

Desa Aska, Desa Gareccing, dan Desa Polewali) dimana aparat pengelola dana desa memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan akuntansi atau ilmu ekonomi. Sehingga tidak jarang laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan aturan dengan kata lain pengelolaan dana desa masih belum akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan diatas maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya pengaturan hukum anggaran dana desa, sudah seharusnya pengelolaan dana desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal. Sehingga aparat pemerintah desa harus mempunyai kemampuan dasar dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa,
2. Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan komitmen organisasi aparatur pemerintah desa maka kepala desa beserta BPD perlu memperbaiki kekurangan yang masih ada seperti melakukan inovasi agar aparatur pemerintah desa bisa lebih memilikaii keyakinan terhadap tujuan organisasi serta memiliki kesetiaan dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan desa*. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrajaya J. A. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Skripsi. Lampung : Universitas Lampung
- Jogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Nurbaedah. 2009. *Peran Pengaruh Auditor Internal Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Pandey, J., K., B. dan R., J. 2015. *Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 1 No. 2. Hal. 1-9. 2015.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013
- Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Edisi 3: Jakarta. Mitra Wacana Media
- Romantis P. A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Sarifuddin Mada. dkk. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Madano. Universitas Sam Raatulangi.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suryana F. H. 2013. *Pengaruh Struktur Audit, Komitmen Organisasi, Konflik Peran Dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

v.wiratna sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*: Yogyakarta. Pustaka Baru Press

warsono dkk. 2013. *Akuntansi Pengantar 1 Adaptasi IFRS*. Yogyakarta: AB PUBLISHER

www.google.com/permendagri113,2014/tentangdesa diakses Tanggal 22 Maret 2018, Pukul 20:00 WITA

www.google.com/uu.no.6.2014/tentangdesa diakses Tanggal 22 Maret 2018, Pukul 20:00 WITA

www.google.com/uu.no.71,2014/tentangdesa diakses Tanggal 22 Maret 2018, Pukul 20:00 WITA

www.online24jam.com diakses Tanggal. 21 Maret 2018, Pukul.21:00 WITA

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

UJI KUALITAS DATA

1. Uji Validitas

Variabel Kompetensi Akuntansi (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Kompetensi Akuntansi
X1.1	Pearson Correlation	1	,705**	,477**	,606**	,733**	,507**	,891**
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,000	,000	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,705**	1	,419*	,558**	,502**	,696**	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000		,021	,001	,005	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,477**	,419*	1	,262	,245	,452*	,594**
	Sig. (2-tailed)	,008	,021		,162	,192	,012	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,606**	,558**	,262	1	,434*	,468**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,162		,016	,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	,733**	,502**	,245	,434*	1	,391*	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,192	,016		,033	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,507**	,696**	,452*	,468**	,391*	1	,747**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,012	,009	,033		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Kompetensi Akuntansi	Pearson Correlation	,891**	,869**	,594**	,726**	,736**	,747**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Komitmen Organisasi (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Komitmen Organisasi
X2.1	Pearson Correlation	1	,049	,339	,588**	,691**	,636**
	Sig. (2-tailed)		,797	,067	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,049	1	,233	,116	,306	,600**
	Sig. (2-tailed)	,797		,216	,543	,100	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,339	,233	1	,580**	,475**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,067	,216		,001	,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,588**	,116	,580**	1	,596**	,733**
	Sig. (2-tailed)	,001	,543	,001		,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,691**	,306	,475**	,596**	1	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,100	,008	,001		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Komitmen Organisasi	Pearson Correlation	,636**	,600**	,771**	,733**	,794**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Akuntabilitas (Y)

Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Akuntabilitas
Y.1	Pearson Correlation	1	,375 [*]	,635 ^{**}	,705 ^{**}	,494 ^{**}	,860 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,041	,000	,000	,005	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	,375 [*]	1	,465 ^{**}	,215	,415 [*]	,632 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,041		,010	,254	,023	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	,635 ^{**}	,465 ^{**}	1	,523 ^{**}	,500 ^{**}	,816 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,010		,003	,005	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	,705 ^{**}	,215	,523 ^{**}	1	,569 ^{**}	,777 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,254	,003		,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	,494 ^{**}	,415 [*]	,500 ^{**}	,569 ^{**}	1	,757 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,005	,023	,005	,001		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,860 ^{**}	,632 ^{**}	,816 ^{**}	,777 ^{**}	,757 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reabilitas
a. Kompetensi Akuntansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,853	6

- b. Komitmen Akuntansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,689	5

- c. Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,824	5

LAMPIRAN 2

KUESIONER

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA DANA DESA

N O	PERNYATAAN	DIMENSI	NILAI				
			SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Pernyataan berikut :							
1.	Pengetahuan lebih mengenai akuntansi dapat memudahkan pembuatan laporan keuangan.	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
2.	Sering mengikuti kegiatan seminar yang menambah kompetensi dalam pengelolaan dana desa.	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
3.	Mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan keahlian secara teknis	Kemampuan (<i>Skill</i>)					
4.	Meningkatkan kemampuan aparat dan menempatkan sesuai dengan komando kerja dapat mempercepat pemecahan masalah.	Kemampuan (<i>Skill</i>)					
5.	Peningkatan kreativitas dan inovasi dalam organisasi (pemerintah desa) dapat meningkatkan semangat bekerja.	Sikap(<i>Attitude</i>)					
6.	Aparat pemerintah desa memiliki sikap ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan.	Sikap(<i>Attitude</i>)					

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

NO	PERNYATAAN	DIMENSI	NILAI				
			SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Pernyataan berikut :							
1.	Dengan adanya keyakinan yang tinggi, saya berharap tujuan organisasi bisa dicapai.	Afektif					
2.	Saya bangga memberitahu orang lain bahwa saya adalah bagian dari pemerintah desa.	Afektif					
3.	Saya ingin melakukan usaha yang luar biasa melebihi yang diharapkan demi mempertahankan organisasi.	Keberlanjutan					
4.	Adanya kebersamaan dan kenyamanan dalam organisasi akan menciptakan loyalitas dalam bekerja.	Keberlanjutan					
5.	Aparat bertanggungjawab atas apa yang diprogramkan demi keberlangsungan organisasi.	Normatif					

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

NO	PERNYATAAN	DIMENSI	NILAI				
			SS 5	S 4	N 3	TS 2	ST S 1
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Pernyataan berikut :							
1.	Dengan adanya integritas dan keterbukaan terhadap informasi yang terjadi, sehingga pengelolaan dana desa bisa dikatakan akuntabel	Kejujuran dan Hukum					
2.	Aparat desa seharusnya patuh terhadap pelapora pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang	Kejujuran dan Hukum					
3.	Penyusunan lapoan keuangan dana desa sesuai dengan prosedur, objektif (kenyataan yang ada).	Proses					
4.	Dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana desa harus memenuhi kebutuhan informasi.	Proses					
5.	Laporan pertanggungjawaban dana desa dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	Proses					

LAMPIRAN 3

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Desa	Usia-Tahun	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Mustafa	Bulukamase	>32	BPD	S1
2	Umar, S.Sos	Bulukamase	>32	Kepdes	S1
3	Ahmad, SH	Bulukamase	>32	Sekdes	S1
4	Asmiati, S.Hum	Bulukamase	27 - 32	Bendes	S1
5	Hasriani	Bulukamase	22 – 27	Kaur Keuangan	SMK
6	Arifuddin	Aska	>32	Kepdes	SMA
7	Apriyanto	Aska	>32	Sekdes	SMA
8	Kasmiasi, A.Md	Aska	22 – 27	Bendes	D3
9	Hajrah, S.Pd.I	Aska	>32	Kaur Keuangan	S1
10	H. Abd. Salam	Aska	>32	BPD	SMA
11	Sartono	Palae	>32	Kepdes	SMA
12	Anhar	Palae	>32	Sekdes	SMA
13	Nasmawati, S.Pd.I	Palae	22 – 27	Bendes	S1
14	Fauzan Muslim	Palae	22 – 27	Kaur Keuangan	S1
15	Arif Rahman	Palae	>32	BPD	SMA
16	Imran	Polewali	>32	Kepdes	SMA
17	Firman	Polewali	>32	Sekdes	SMA
18	Megawati	Polewali	>32	Bendes	SMA
19	Sri Undayana	Polewali	18 – 22	Kaur Keuangan	S1
20	Maslan	Polewali	22 – 27	BPD	SMA
21	Irwan Parenrengi	Gareccing	27 – 32	Kepdes	S1
22	Fahri, S.E	Gareccing	>32	Sekdes	S1
23	Kasmawati, S.Pd	Gareccing	>32	Bendes	S1
24	A.Mappigau	Gareccing	>32	Kaur Keuangan	S1
25	Bahri	Gareccing	>32	BPD	SMA
26	Ir. Abdul Rajab	Talle	>32	Kepdes	S1
27	Umar Said	Talle	>32	Sekdes	S1
28	Sinar Alam, SP	Talle	22 – 27	Bendes	S1
29	Amal	Talle	22 – 27	Kaur Keuangan	S1
30	Jamaluddin	Talle	>32	BPD	SMA

LAMPIRAN 4

HASIL REKAPITULASI DATA KUESIONER

No	Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa																		Jumlah
	Kompetensi Akuntansi						Komitmen Organisasi						Akuntabilitas						
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5			
1	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	5	30	4	3	5	5	5	22	4	4	5	5	5	23
3	5	5	5	5	5	5	30	4	3	5	5	5	22	4	4	5	5	5	23
4	5	5	5	5	5	5	30	4	3	5	5	5	22	4	4	5	5	5	23
5	4	4	4	4	5	4	25	4	2	2	3	4	15	2	4	4	3	4	17
6	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	3	15	3	3	2	4	4	16
7	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	5	5	23	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	5	5	23	5	5	5	5	5	25
10	3	2	5	4	3	4	21	3	3	2	4	3	15	4	4	5	4	3	20
11	5	5	5	4	5	5	29	4	3	4	4	5	20	5	5	5	4	5	24
12	4	4	4	4	4	5	25	3	2	2	4	4	15	4	3	4	4	4	19
13	4	5	5	4	4	5	27	4	5	4	4	5	22	4	5	5	4	5	23
14	4	5	5	4	4	5	27	4	5	4	4	5	22	4	5	5	4	5	23
15	4	5	5	4	4	5	27	4	4	5	5	5	23	3	4	4	4	3	18
16	4	4	5	4	4	5	26	4	2	3	4	4	17	2	5	4	4	5	20
17	4	4	4	5	4	5	26	4	5	4	5	4	22	4	5	5	4	5	23
18	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	5	4	21	5	4	5	4	5	23
19	5	5	5	5	5	5	30	4	2	4	4	4	18	4	5	4	4	5	22
20	5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	5	5	23	4	5	4	4	4	21
21	5	5	5	5	5	5	30	5	2	4	5	5	21	5	5	5	5	5	25
22	5	4	5	4	5	5	28	5	2	2	5	5	19	5	5	5	5	5	25
23	5	4	5	4	5	5	28	5	2	2	5	5	19	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	5	5	5	30	5	2	5	5	5	22	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	5	5	23	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	4	5	5	29	4	1	5	5	4	19	5	4	5	5	5	24
28	5	5	4	5	4	5	28	4	1	5	5	4	19	4	5	5	4	4	22
29	4	3	4	4	5	4	24	4	4	4	5	5	22	4	5	4	4	4	21
30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	22	4	5	4	4	4	21

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI







